

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN JEPANG KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO

Nadrotun Na'im

13040254024 (PPKn, FISH, UNESA) naimnadrotun@gmail.com

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi politik oleh Huntington dan Nelson. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan pemilihan hanya terlibat dalam penggunaan hak pilih saja. Dalam *lobby* partisipasi politik dilakukan dengan menghubungi kepala desa, serta pernah mengusulkan sesuatu tentang kebijakan di tingkat desa yaitu berkaitan dengan kebijakan program pembangunan Desa. Dalam kegiatan organisasi partisipasi politik dilakukan dengan bergabung dalam keanggotaan perangkat desa karena terdapat satu anggota masyarakat Samin yang menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Margomulyo. Dalam *contacting* partisipasi masyarakat Samin dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan bupati maupun dengan kepala desa, selain itu juga masyarakat Samin ikut terlibat dalam rapat ditingkat desa, sehingga masyarakat Samin dapat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat Desa. Tindakan kekerasan tidak dilakukan dalam masyarakat Samin.

Kata Kunci: partisipasi politik, masyarakat Samin.

Abstract

This study use qualitative research aims to describe the political participation of Samin Society in Japan hamlets Margomulyo District Bojonegoro Regency. The theory used is the theory of political participation by Huntington and Nelson. This research used qualitative approach with descriptive research method. Data collection techniques which were used in this research are observation, interview, documentation and triangulation. Analytical techniques used qualitative analysis techniques with the first step is data reduction, the second is data presentation, and the third is withdrawal of conclusions. The results show that the political participation of the Samin society in electoral activities is only involved in the use of suffrage. In lobbying, political participation is done by contacting the village head, and once suggested something about the policy at the village level that is related to the policy of the village development program. In the activities of the political participation organization is done by joining the membership of the village funcionary in Margomulyo District because there is one Samin society who served as the village secretary in there. In contacting Samin society participation is done by establishing good relationship with regents and with village head, besides also society of Samin involved in meeting at village level, so that the Samin society can get involved in the policy making process at the village level. Violent acts are not committed in the Samin society.

Keywords: Political Participation, Samin Society.

PENDAHULUAN

Demokrasi di dalam suatu negara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya demokrasi maka negara dapat secara langsung melibatkan masyarakat luas dalam pembuatan suatu keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan kepentingan bersama.

Negara Indonesia menjadikan demokrasi sebagai paham politik yang dianutnya. Hal ini berlandaskan pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4. Pembukaan alinea ke-4 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat,

sehingga rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk terselenggaranya sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini telah tercantum dalam dasar negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam hal ini rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk dapat menentukan terselenggaranya sistem pemerintahan. Rakyat mempunyai peranan penting dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan politik, melibatkan rakyat dalam proses pembuatan keputusan maupun kebijakan politik ini bertujuan agar pembuatan keputusan maupun kebijakan dapat sesuai dengan kemauan rakyat.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, pemilu juga merupakan bentuk pemenuhan hak asasi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pejabat-pejabat negara, hak yang dimaksud adalah hak politik. Pemilu juga merupakan salah satu tanda negara dengan menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, dalam hal ini antara pemilu dan demokrasi tidak dapat terpisahkan, karena pemilu merupakan alat untuk melaksanakan demokrasi di sebuah negara, sedangkan demokrasi itu sendiri merupakan landasan untuk terselenggaranya pemilu di negara. Dalam hal ini pemilu memiliki hubungan yang signifikan dengan demokrasi apabila peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya hak asasi manusia terutama hak sipil dan hak politik (Merloe dalam Cholisin, dkk, 2007: 138).

Partisipasi politik merupakan salah satu aktivitas warga negara yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Dalam hal ini warga negara menggunakan hak pilihnya untuk dapat mempengaruhi pembuatan dan pembentukan kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar pembuatan dan pembentuk kebijakan politik dapat memenuhi kebutuhan warga negara. Partisipasi politik ini digunakan pada negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, karena dalam hal ini masyarakat di berikan kebebasan untuk dapat memilih secara sukarela dalam proses politik.

Masyarakat Samin merupakan perkumpulan masyarakat yang pertama kali ada di Blora Jawa Tengah yang di pimpin oleh Samin Soerosentiko dari Ploso, Kecamatan Randu Blatung, kabupaten Blora. Pada waktu itu Samin Soerosentiko disebut sebagai kyai Samin. Ajaran dalam masyarakat Samin adalah mengakui adanya Tuhan serta tidak membedakan agama yang dianutnya. Dalam ajaran Samin, masyarakat Samin diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain kalau tidak ingin disakiti, harus saling hormat-menghormati sesama

manusia di dunia, jangan pernah mengambil apapun yang bukan haknya dan beberapa ajaran lainnya. Sampai sekarang ajaran Samin ini masih di pegang teguh oleh masyarakat Samin, khususnya keturunan dari Samin Soerosentiko yaitu Harjo Kardi, yang sekarang ini bertempat tinggal di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Masyarakat Samin masih tetap memegang teguh ajaran dari Samin Soerosentiko, yang salah satunya adalah ajaran sikap arif dan jujur. Khususnya keturunan Samin Soerosentiko yaitu Harjo Kardi. Beliau tetap memegang teguh sikap arif dan jujur. Sikap arif dan jujur ini juga diterpkan dalam kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam kegiatan politik. Hal ini dibuktikan oleh Harjo Kardi yang tidak ikut memilih dalam pemilu legislatif tahun 2009, Harjo Kardi juga tidak mengurus surat pemberitahuan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ketika pemilu legislatif tahun 2009 ada beberapa calon legislatif dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari berbagai daerah datang ke rumah Harjo Kardi untuk meminta dukungan dan do'a restu. Namun Harjo Kardi tetap memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Karena jika memilih maka akan menimbulkan rasa iri pada caleg yang lain (<http://regional.kompas.com/read/2009/04/10/11091966/Orang.Samin.Memandang.Pemilu>, diakses tanggal 25 Mei 2017, 00.52 WIB).

Harjo Kardi sebagai generasi ke empat dari Samin Surosentiko mengatakan hal yang sama ketika pilkada di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008. Dalam pilkada tersebut terdapat tiga pasangan yang mencalonkan diri sebagai bupati, tiga pasangan tersebut datang ke rumah Harjo Kardi untuk meminta dukungan dan do'a restu. Sehingga Harjo Kardi memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Begitu juga ketika pilpres tahun 2009 Harjo Kardi juga tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun demikian Harjo Kardi tidak akan memengaruhi keluarganya untuk tidak ikut memilih. Adapun masyarakat Samin yang lain. (<http://regional.kompas.com/read/2009/04/10/11091966/Orang.Samin.Memandang.Pemilu>, diakses tanggal 25 Mei 2017, 00.52 WIB).

Pada pelaksanaan pilkukada Jawa Timur tahun 2008, masyarakat Samin tidak golput karena hampir seluruh masyarakat Samin yang mempunyai hak pilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun ketika pilkukada Jawa Timur tahun 2008 tidak ada pasangan calon gubernur yang melakukan pendekatan dengan masyarakat Samin. Termasuk tidak ada pemasangan gambar calon gubernur selama putaran kampanye. Namun hal ini tidak mempengaruhi masyarakat Samin untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Di masyarakat Samin selama pemilu di era orde

baru maupun era reformasi tidak ada perbedaan yang tajam diantara masyarakat Samin. Tetapi dalam menentukan pilihan tetap ada perbedaan. Meskipun berbeda suasana tetap terjaga guyub, sebagaimana budaya masyarakat Samin yang dipegang teguh sampai saat ini (<http://arsip.gatra.com/2008-06-10/artikel.php?id=115355> diakses tanggal 25 Mei 2017, 01.44 WIB).

Pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 di masyarakat Samin terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di TPS 8 di kediaman Kasun yaitu Sukijan, terdapat 356 pemilih dan di TPS 9 di kediaman ketua RT yaitu Sidi, terdapat 390 pemilih. Berbeda dengan pemilu sebelumnya karena TPS biasanya hanya satu di kediaman Harjo Kardi. Meskipun demikian Partisipasi masyarakat Samin tetap tinggi dalam mempergunakan hak pilihnya. Karena sebagian besar masyarakat Samin mendatangi TPS, baik yang muda maupun golongan tua yang masih “*nguggemi*” (memegang teguh) ajaran Samin Surosentiko (<http://www.kabarbisnis.com/read/281667/warga-samin-bojonegoro-belum-paham-pemilu>, diakses tanggal 25 Mei 2017, 01.36 WIB).

Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, ketika pemilukada Jawa Timur tahun 2013, Harjo Kardi memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Harjo Kardi mengatakan bahwa ketika pemilukada Jawa Timur tahun 2013 memilih pasangan Karsa karena hanya pasangan Karsa yang datang ke rumahnya untuk meminta dukungan dan do'a restu. Harjo Kardi memilih calon pemimpin berdasarkan hati nuraninya bukan adanya paksaan dari pihak tertentu. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Samin, masyarakat Samin memilih berdasarkan hati nurani dan tanpa paksaan (<http://arsip.gatra.com/2008-06-10/artikel.php?id=115355>, diakses tanggal 25 Mei 2017, 01.44 WIB). Tetapi berbeda dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Bojonegoro tahun 2013, pilkada Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 terdapat lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Harjo Kardi mengatakan bahwa ke lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati datang kesini semua untuk meminta do'a restu dan dukungan. Sehingga Harjo Kardi memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. (Wawancara, 3 Maret 2017)

Pada pelaksanaan pemilu legislatif Kabupaten Bojonegoro tahun 2014, Harjo Kardi memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, karena menurutnya jika memilih salah satu calon anggota legislatif akan menimbulkan rasa iri hati pada yang lainnya (<http://pemilu.okezone.com/read/2014/03/14/568/955145/kaum-samin-di-bojonegoro-bakal-golput>, diakses tanggal 9 Maret 2017, 02.04 WIB). Pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 di dusun Jepang Kecamatan

Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni TPS 10 dan TPS 11. Pada TPS 10 terdapat 307 pemilih dan pada TPS 11 terdapat 316 pemilih. (<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/130561/komunitas-samin-di-bojonegoro-gunakan-hak-pilihnya>, diakses tanggal 9 Maret 2017, 03.07 WIB).

Menurut ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 10, Pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 masyarakat Samin di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro tidak pernah mempermasalahkan mengenai penggunaan hak pilihnya, mereka memilih berdasarkan kesukaannya karena kebanyakan dari mereka tidak ada yang mengenali calon legislatif dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Ketua KPPS juga mengatakan bahwa warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 karena dengan alasan yang tidak memungkinkan, seperti warga yang bekerja di luar kota yang tidak bisa pulang, serta warga yang sudah terlalu tua sehingga tidak mampu berjalan menuju TPS (<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/130561/komunitas-samin-di-bojonegoro-gunakan-hak-pilihnya>, diakses tanggal 9 Maret 2017, 03.07 WIB).

Jadi masyarakat Samin yang bertempat tinggal di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pemilu memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Hal ini terwujud dari banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan pada Pemilu legislatif tahun 2014.

Di bawah ini adalah tabel jumlah penduduk di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1. Jumlah Masyarakat Samin di Dusun Jepang

Jumlah Keseluruhan	Jumlah KK	Jumlah KK di RT 1	Jumlah KK di RT 2
228	48	25 KK	23 KK

Sumber: Kepala Dusun di Dusun Jepang

Di Dusun Jepang ini merupakan lokasi dalam penelitian, karena di Dusun Jepang terdapat perkumpulan masyarakat Samin yang berjumlah sekitar 48 KK dengan jumlah keseluruhan 228 orang. Menurut Kepala Dusun yaitu Bapak Sukijan menjelaskan jika kurang lebih terdapat 192 anggota masyarakat Samin yang ikut memilih dalam pelaksanaan pemilu, karena menurutnya mereka telah berusia diatas 17 tahun, sehingga jumlah anggota masyarakat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya ketika pemilu.

Dalam hal ini masyarakat Samin merupakan salah satu masyarakat yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ketika dijajah oleh Kolonial Belanda. Dalam memperjuangkan

kemerdekaan, masyarakat Samin memiliki ajaran yang harus dipatuhi dalam kehidupannya. Ajaran Samin tersebut tetap dipegang teguh sampai sekarang terutama ajaran sikap arif dan jujur. Sikap arif dan jujur ini juga diterapkannya dalam kegiatan politik. Jadi penelitian ini menarik dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pada masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Jika dilihat dari sejarahnya masyarakat Samin merupakan salah satu perkumpulan masyarakat yang apatis terhadap kegiatan politik yang berkembang di negara Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah yaitu bagaimana partisipasi politik masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro ? Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011 : 9). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Best (dalam Sukardi, 2009: 157) bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sebagaimana adanya. Alasan penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan lebih rinci mengenai partisipasi politik masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Partisipasi politik yang di maksud adalah bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, yaitu: Kegiatan pemilihan, *Lobby*, Kegiatan organisasi, *Contacting*, Tindakan kekerasan.

Dalam hal ini informan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Informan penelitian ini adalah masyarakat Samin yang berjumlah lima orang. Dengan kunci informan (*key informan*) yaitu sesepuh dari masyarakat Samin, sekaligus sebagai cicit dari pemimpin Samin, yaitu Harjo Kardi. Untuk informan selanjutnya adalah perangkat desa di desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, serta masyarakat Samin hingga menemukan data jenuh. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah informan sebagai sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Dalam memilih informan penelitian ini memiliki beberapa kriteria informan yaitu: pertama, termasuk dalam anggota masyarakat Samin, kedua, masyarakat Samin yang tidak menggunakan hak pilihnya serta masyarakat Samin yang menggunakan hak pilihnya ketika pelaksanaan pemilu, selanjutnya perangkat desa, karena perangkat desa dianggap dapat memberikan informasi tambahan mengenai partisipasi politik masyarakat Samin. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Peneliti sebagai alat untuk dapat mencapai tujuan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti akan terjun sendiri ke lapangan sampai pembuatan kesimpulan (Sugiyono, 2012: 223).

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2011: 225). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah informan penelitian, karena dalam penelitian ini informan dapat memberikan sumber data yang secara langsung. Selanjutnya adalah sumber data sekunder, dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini adalah berita tentang partisipasi politik masyarakat Samin, serta perolehan hasil suara masyarakat Samin di dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Sumber ini diperoleh dari KPU Bojonegoro.

Teknik pengumpulan data jika dilihat dari segi cara maka teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi empat, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara lebih rinci mengenai partisipasi politik pada masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan partisipasi politik pada masyarakat Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini teknik triangulasi data yang dipakai adalah teknik triangulasi sumber, dalam teknik triangulasi sumber maka menggunakan sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu dari lima informan dalam penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data, mengajukan

pertanyaan yang analitis, dan menulis, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Dengan terlibat dalam kegiatan politik diharapkan dapat ikut secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi keputusan politik. Keputusan politik ini dibuat oleh para pelaku politik. Para pelaku politik mampu menduduki jabatannya sebagai pejabat pemerintah karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi dalam partisipasi politik keberadaan rakyat memiliki peranan penting untuk dapat memengaruhi hasil pemilu dalam proses pemilihan pejabat pemerintah.

Dengan demikian sebagai warga negara sudah seharusnya dapat ikut terlibat dalam kegiatan politik, begitu juga dengan masyarakat Samin. Masyarakat Samin diharapkan dapat ikut terlibat langsung dalam kegiatan politik. Seperti partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan pemilihan. Masyarakat Samin tetap ikut terlibat dalam penggunaan hak pilihnya ketika adanya pemilu. Hal itu di sampaikan oleh informan sebagai Cicit pemimpin Samin atau generasi ke-empat dari pemimpin Samin yaitu Harjo Kardi.

"...kulo niki ngagem hak pilih nalika calon niku mriki njalok duno nanging nek namung setunggal, kados to pilihan gubernur sing wingi kulo nggeh ngagem hak pilih, amergi namung setunggal calon sing mriki nyuwun duno. Nanging bedo malih nalika wonten pemilu calon e mriki sedanten nyuwun duno kulo nggeh mboten milih, kados to pilihan lurah teng desa Margomulyo sing calon e wonten 10 tiyang mriki sedanten, kulo nggeh mboten milih..."

"...saya ini menggunakan hak pilih ketika calonnya datang kesini minta do'a tetapi kalau Cuma satu, seperti pemilihan gubernur yang kemarin saya ya menggunakan hak pilih, karena Cuma satu calon yang datang kesini minta do'a. Tetapi berbeda lagi ketika ada pemilu calonnya datang kesini semua minta do'a saya ya tidak memilih, seperti pemilihan kepala Desa di Desa Margomulyo yang calonnya ada 10 orang datang kesini semua, saya ya tidak memilih..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Hal ini dilakukan oleh Harjo Kardi selaku sebagai informan kunci dengan alasan jika memilih salah satu maka akan menimbulkan rasa iri dengan yang lain. Memilih untuk tidak menggunakan hak pilih ketika ada lebih dari satu calon yang datang kerumahnya untuk meminta do'a restu dan dukungan dengan alasan tetap mengutamakan sikap kejujuran dan tidak mau mengingkari janjinya.

"...nek kulo milih salah sijine nopo kulo mboten di pleroki kalih calon liyane, kangge kulo niku mboten sae, amergi kulo sikap kejujuran niku sing paling utomo, niki mpun pakem ingkang kulo ughemi sampek sakniki..."

"...kalau saya memilih salah satunya apa saya tidak diplototi sama calon lainnya, buat saya itu tidak baik, karena saya sikap kejujuran itu yang paling utama, ini sudah ajaran yang saya pegang sampai sekarang..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bambang Sutrisno selaku anak dari Harjo Kardi. Bambang mengatakan jika memang Harjo Kardi memilih untuk tidak menggunakan hak pilih ketika ada lebih dari satu calon yang mendatangnya dengan alasan tidak mau membedakan yang lainnya, serta tidak mau mengingkari janji dan tetap mengutamakan sikap kejujuran.

"...kalau mbah kong mencoblos yang satu maka mbah kong membedakan yang lainnya, kalau boleh semuanya di coblos mbah kong nyoblos, kenapa begitu karena mbah kong tidak mau mengingkari janjinya tetap jujur..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa masyarakat Samin khususnya Harjo Kardi tetap menggunakan hak pilihnya jika calon yang dipilih sesuai dengan pilihannya atau dapat dikatakan sesuai dengan hatinya. Namun jika calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan hatinya maka Harjo Kardi memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti yang dikatakan tadi jika ada lebih dari satu calon yang datang untuk meminta do'a restu dan dukungan, maka Harjo Kardi akan menerima namun dengan catatan tidak memilih karena dianggap tidak sesuai dengan hatinya, jika hatinya mengatakan mendukung semua maka Harjo Kardi tidak menggunakan hak pilihnya.

Harjo Kardi juga menambahkan bahwa masyarakat Samin dalam menggunakan hak pilihnya atas dasar hati nuraninya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapa pun.

"...pokoke kulo niki nek milih nggeh milih mboten kepeksan, milih niku nggeh umpama jago lima nggeh pundi sing disenenge, mboten kok kulo niki ngelumpuke mboten niku kleru ngoten niku, nggeh kudu senengane piyambak-piyambak..."

"...pokoknya saya ini kalau memilih ya memilih tidak terpaksa, memilih itu ya seumpama calon lima ya mana yang disukai, tidak kok saya ini mengumpulkan tidak itu salah seperti itu, ya harus sesuai kesukaannya masing-masing..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa masyarakat Samin dalam menggunakan hak pilih berdasarkan hati nuraninya sendiri tanpa adanya paksaan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Samin tetap

menjunjung tinggi sikap kejujuran, seperti halnya yang dilakukan oleh sesepuh masyarakat Samin yaitu Harjo Kardi. Sikap kejujuran ini sudah menjadi prinsip hidupnya, seperti yang diajarkan oleh pemimpin Samin yaitu Samin Surosentiko.

Masyarakat Samin dalam kegiatan kampanye lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi, karena jika ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye dapat menimbulkan permusuhan dengan yang lain. Hal ini dikatakan oleh Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin di Dusun Jepang. Beliau lebih memilih untuk di rumah dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye.

“kagiyatan kampanye niku kadang nggeh enten wong tukaran leh, kulo nggeh mboten ndherek kagiyatan kampanye wong kulo mboten tukaran, sampean ndherek jago liyani kulo ndherek jago liyane wong kadang kepethuk atine mboten kepenak leh, kulo nggeh teng griya mawon”

“kegiatan kampanye itu terkadang ya ada orang berkelahi kok, saya ya tidak ikut kegiatan kampanye orang saya tidak berkelahi, kamu ikut calon yang lain saya ikut calon yang lain, orang terkadang bertemu hatinya tidak enak hati kok, saya di rumah saja” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017).

Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin juga menambahkan bahwa masyarakat Samin tiap harinya hidup rukun tidak ada perselisihan dengan yang lain, karena masyarakat Samin menganggap bahwa semua saudara. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat Samin tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, karena kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang akan menimbulkan perselisihan dengan yang lain, serta kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang tidak ada manfaatnya.

“...masyarakat mriki (masyarakat Samin) urip bendino podu rukun mboten ndherek ngoten-ngoten niku. Masyarakat mriki (masyarakat Samin) mboten seneng kok benda-bendano sedoyo dulur. Lha nek ndherek kagiyatan kampanye nggeh ngoten niku wau lo mboten kepenak nk kepethuk liyane, teng mriki mboten wonten sing ndherek kagiyatan kampanye, kagiyatan kampanye niku mboten enten manfaate, urip hura-hura mawon...”

“...masyarakat sini (masyarakat Samin) hidup tiap harinya pada rukun tidak ikut begitu-begituan. Masyarakat sini (masyarakat Samin) tidak suka membeda-bedakan semuanya saudara. Kalau ikut kegiatan kampanye ya seperti itu tadi tidak enak hati kalau bertemu lainnya, disini tidak ada yang ikut kegiatan kampanye, kegiatan kampanye itu tidak ada manfaatnya, hidup berhura-hura saja...” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017).

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa masyarakat Samin lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, karena kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Masyarakat Samin juga menganggap bahwa jika ikut terlibat dalam kegiatan kampanye maka akan menimbulkan sikap iri dengan yang lain, serta adanya perselisihan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat Samin yang harus hidup rukun, tidak boleh ada sikap iri dengki dengan yang lain, karena semua saudara tidak boleh ada yang bermusuhan.

Dalam masyarakat Samin tidak ada yang menjadi tim sukses dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini diungkapkan oleh Harjo Kardi. Beliau mengatakan jika masyarakat Samin tidak ada yang menjadi tim sukses, karena dengan menjadi tim sukses dianggap membeda-bedakan dengan yang lain.

“...Nek dados tim sukses niku nggeh beda-bedano, wong kangge kulo beda-bedano niku mboten angsal...”

“...Kalau jadi tim sukses itu ya membeda-bedakan, orang untuk saya membeda-bedakan itu tidak boleh...” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Harjo Kardi juga menambahkan jika dalam masyarakat Samin tidak ada yang menjadi tim sukses, karena bagi masyarakat Samin memilih harus atas kesadaran masing-masing tanpa adanya paksaan dari siapapun, masyarakat Samin memilih berdasarkan hati nuraninya. Beliau juga mengatakan jika untuk mendukung, semua didukung tapi kalau untuk mencari dukungan bagi calon dalam pemilu tidak ada.

“...nek tim sukses lak sing madosi dukungan kangge jagone. Nek teng mriki mboten ngoten niku, wong milih nggeh mboten dipeksan kok nggeh senengane piyambak-piyambak. nek dukung nggeh sedaya kulo dukung nek wonten pilihan, pilihan napa mawon calon e nggeh teng mriki njalok dunga kaleh njalok dukungan, kulo nggeh nampo entene njalok dukungan nggeh kulo dukung...”

“...kalau tim sukses kan yang mencari dukungan untuk calonnya. Kalau disini tidak seperti itu, orang memilih ya tidak dipaksakan kok ya sesuai kesukaannya sendiri-sendiri. kalau mendukung ya semuanya saya dukung kalau ada pemilihan, pemilihan apa saja calonnya ya datang kesini meminta do'a sama meminta dukungan, saya iya menerima adanya meminta dukungan ya saya dukung...” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Sumarni juga menambahkan bahwa jika menjadi tim sukses maka akan membeda-membedakan dengan yang lain, karena dengan menjadi tim sukses dianggap hanya mementingkan golongannya sendiri. Hal ini bagi masyarakat Samin dianggap salah karena semua saudara jadi tidak boleh membeda-bedakan dengan yang lain. Sumarni juga mengatakan bahwa masyarakat Samin

kalau memilih ya memilih tapi kalau untuk menjadi tim sukses tidak ada karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip hidupnya yang harus rukun tidak boleh membeda-bedakan karena semua saudara.

“...masyarakat Samin nek dikongkon milih nggeh milih, nanging nek dados tim sukses mboten, tim sukses niku sing madosi dukungan niku, niku jenenge beda-bedano liyane. Lha wong teng masyarakat Samin niku mboten angsal ngoten niku kok, nggeh sedoyo dulur mboten kok beda-bedano...”

“...masyarakat Samin kalau disuruh memilih ya memilih, tetapi kalau menjadi Tim sukses tidak, tim sukses itu namanya membeda-bedakan yang lainnya. Di masyarakat Samin itu tidak boleh seperti itu, ya semuanya saudara tidak kok membeda-bedakan...” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa masyarakat Samin tidak ada yang menjadi tim sukses, karena menjadi tim sukses dianggap membeda-bedakan dengan yang lain. sehingga menjadi tim sukses dianggap tidak sesuai dengan prinsip hidupnya yang harus hidup rukun dan tidak membeda-bedakan dengan yang lain, karena semua dianggap saudara.

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam Lobby yaitu menghubungi pimpinan politik. Menghubungi pimpinan politik untuk Bupati Bojonegoro tidak, karena menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin mengatakan bahwa tidak pernah menghubungi bupati, tidak dihubungi sudah datang kerumah untuk menjalin silaturahmi.

“...nek ngubungi bupati nggeh mboten nate, mboten usah ngubungi nggeh mpun mriki, nek hubungan kulo kalih bupati Yoto nggeh hubungan sae, hubungan silaturahmi mawon...”

“...kalau menghubungi bupati ya tidak pernah, tidak usah menghubungi ya sudah kesini, Kalau hubungan saya dengan bupati Yoto ya hubungan baik, hubungan silaturahmi saja...” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Harjo Kardi juga menjelaskan bahwa menghubungi pimpinan politik untuk kepala desa Margomulyo pernah, beliau mengatakankan bahwa menghubungi kepala desa ketika ada warga Dusun Jepang yang rumahnya kebakaran. Beliau menghubungi kepala desa untuk meminta tolong kepada kepala desa agar warga yang rumahnya kebakaran mendapatkan bantuan dari dana Desa. Beliau juga mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi bulan Juni kemarin.

“...nek ngubungi kepala Desa nggeh nate kulo. Nalika teng masyarakat mriki wonten tiyang sing omahe kobong, nembe mawon kedadian niku, paling mpun wonten nek gangsal welasan dinten kedadian niku. Wektu niku kulo ngubungi pak lurah, kulo ngomong kalih pak lurah supaya

tiyang sing omahe kobong niku angsal bantuan saking dana Desa...”

“...kalau menghubungi kepala Desa ya pernah saya. Ketika di masyarakat sini ada orang yang rumahnya kebakaran, baru saja kejadian itu, mungkin sudah ada kalau lima belasan hari kejadiannya. Waktu itu saya menghubungi pak lurah, saya bicara dengan pak lurah supaya orang yang rumahnya kebakaran itu dapat bantuan dari dana Desa...” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Sidi selaku ketua RT 01 juga membenarkan jika memang Harjo Kardi telah menghubungi kepala desa untuk meminta bantuan supaya warga Dusun Jepang yang terkena musibah rumahnya kebakaran mendapatkan bantuan dari dana desa.

“nek kepala Desa nggeh nate ngubungi, nalika teng masyarakat mriki enten sing omahe kobong mbak, kulo ngertose nggeh dibejani kalih pak lurah, teruse pak lurah tangklet kalih kulo “napa leres teng Dusun Jepang wonten warga sing griyane kobong? ngoten”, kulo nggeh ngomong nggeh wonten, teruse pak lurah “mbah Harjo nembe mriki ngomong kalih kulo supaya warga sing griyani kobong niku angsal bantuan Desa ngoten”, kulo nggeh setuju mawon wong ancen niku sing bener kok.

“kalau kepala Desa ya pernah menghubungi, ketika di masyarakat sini ada yang rumahnya kebakaran mbak, saya tahunya ya dikasih tahu oleh pak lurah, katanya pak lurah tanya dengan saya “apakah benar di Dusun Jepang ada warga yang rumahnya kebakaran? begitu”, saya ya ngomong iya ada, katanya pak lurah “mbah Harjo baru saja datang kesini bicara dengan saya supaya warga yang rumahnya kebakaran itu dapat bantuan desa begitu”, saya ya setuju saja orang memang itu yang benar kok.” (wawancara: Senin, 3 Juli 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa hubungan antara Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin dengan kepala desa di Desa Margomulyo memiliki hubungan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan keputusan yang dibuat oleh kepala desa beserta jajarannya untuk dapat membantu warga yang rumahnya kebakaran sesuai dengan permintaan Harjo Kardi. Dengan demikian Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin memiliki hubungan baik dengan kepala desa beserta perangkat lainnya. Selain menghubungi kepala desa, Harjo Kardi juga kerap kali diundang untuk menghadiri rapat Desa. Dalam rapat desa tersebut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin pernah mengusulkan untuk pembuatan dam di Dusun Jepang.

“...nek tingkat Desa kulo nggeh nate ngusulno pendapat nalika rapat Desa, kulo ngusulno supaya masyarakat mriki niku didhamelno dam malih, sakjane masyarakat mriki nggeh mpun di dhamelno dam nanging mpun jebol, wong dhamel e dam niku tahun 1999, nalika niku

dhamel dam e di bantu kalih bupati Atlan, dam e nggeh mboten saget didhamel ngairi sawah nek jebol, napa malih teng mriki niku masyarakate sing kathah nggeh tani, nek dam e tasek jebol nggeh mboten saget bantu tiyang tani nanduri sawahe..."

"...kalau tingkat Desa saya ya pernah mengusulkan pendapat ketika rapat Desa, saya mengusulkan supaya masyarakat sini dibuatkan dam (bendungan) lagi, sebenarnya masyarakat sini ya sudah dibuatkan bendungan tetapi sudah jebol, orang pembuatan bendungannya itu tahun 1999, ketika itu pembuatan bendungannya dibantu oleh bupati Atlan, bendungannya ya tidak bisa digunakan untuk mengairi sawah kalau *jebol*, apalagi disini itu masyarakat yang banyak ya tani, kalau bendungannya masih *jebol* ya tidak bisa membantu orang tani untuk menanam sawahnya..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Hal ini di ungkapkan oleh Harjo Kardi, beliau menjelaskan jika untuk mengusulkan sesuatu di tingkat Desa pernah yaitu mengusulkan untuk pembuatan dam di Dusun Jepang, beliau menjelaskan jika sebenarnya di Dusun Jepang sudah memiliki dam, namun tidak bisa digunakan untuk mengairi sawah karena sudah *jebol*. Harjo Kardi juga menambahkan jika mayoritas masyarakat Dusun Jepang adalah petani, sehingga Harjo Kardi mengusulkan untuk pembuatan dam di Dusun Jepang, dengan tujuan untuk membantu petani untuk meningkatkan hasil panennya, jika hasil panen meningkat maka sumber daya alam yang dihasilkan juga meningkat, dan jika sumber daya alam meningkat maka perekonomian masyarakat Dusun Jepang juga meningkat.

"tujuane nggeh supaya sektor pertanian Dusun mriki ningkat, supaya masyarakat mriki saget ningkatno sumber daya alam e. Nek sektor pertaniane sae, sumber daya alam e nggeh sae, niku nggeh mpun mesti saget ningkatno ekonomi e masyarakat mriki, nek ekonomi e masyarakat mriki ningkat nggeh saget ngurangi jumlah masyakat sing miskin"

"tujuannya ya supaya sektor pertanian dusun sini meningkat, supaya masyarakat sini bisa meningkatkan sumber daya alamnya. Kalau sektor pertaniannya bagus, sumber daya alamnya ya bagus, itu ya sudah jelas dapat meningkatkan perekonomiannya masyarakat sini, kalau perekonomiannya masyarakat sini meningkat ya bisa mengurangi jumlah masyarakat yang miskin" (wawancara: Selasa, 20 Juli 2017)

Untuk mengusulkan sesuatu tingkat Kabupaten tidak, karena bagi masyarakat Samin segala kebijakan yang dibuat pemerintah harus dipatuhi termasuk kebijakan tingkat daerah Kabupaten. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Samin karena dulu ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda Samin Surosentiko selaku pemimpin masyarakat Samin ketika melawan penjajahan Belanda

sudah berpesan kepada anak cucunya dengan menggunakan bahasa sanepan yaitu "*yen wis pitukule kanjeng Jawa, tinggi Jawa tunggu rakyat, manggon mburi manut ombake banyu*" artinya kalau negara sudah dipimpin oleh orang Jawa maka semua masyarakat Samin harus patuh terhadap segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah, yaitu berkaitan dengan kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

"...nek ngusulno pendapat kangge kebijakan teng tingkat Kabupaten nggeh mboten leh, wong kangge kulo niki sedoyo kebijakan kulo panuti, napa malih kebijakan niku kangge kesejahteraan masyarakat, saking mbah buyut kulo nggeh mpun di peseni ngangge basa sanepan "yen wis pitukule kanjeng Jawa, tinggi Jawa tunggu rakyat, manggon mburi manut ombake banyu" artine nek wis muncul pemimpin jawa masyarakat mriki nggeh kudu manut kaleh aturan utawa kebijakan sing di dhamel pemimpin jawa..."

"...kalau mengusulkan pendapat untuk kebijakan ditingkat Kabupaten ya tidaklah, orang untuk saya ini semua kebijakan saya patuhi, apa lagi kebijakan itu untuk kesejahteraan masyarakat, dari mbah buyut saya ya sudah dipesan dengan menggunakan bahasa *sanepan* (pribahasa) "*yen wis yen wis pitukule kanjeng Jawa, tinggi Jawa tunggu rakyat, manggon mburi manut ombake banyu*" artinya kalau sudah muncul pemimpin jawa masyarakat sini (masyarakat Samin) ya harus patuh dengan aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat pemimpin jawa..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Bambang Sutrisno juga menambahkan jika pesan yang disampaikan oleh Samin Surosentiko dijadikan prinsip oleh masyarakat Samin untuk selalu patuh dan taat terhadap segala peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Beliau juga membenarkan jika dulu masyarakat Samin tidak mau membayar pajak karena dulu masih dijajah oleh Belanda, namun setelah negara Indonesia dipimpin oleh orang Jawa maka masyarakat Samin patuh terhadap segala peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

"...pesan itu dijadikan prinsip hidup masyarakat Samin untuk tetap mematuhi segala peraturan maupun kebijakan yang dibuat pemerintah. Sekarang ini kan yang mimpin orang Jawa jadi ya sudah mematuhi segala peraturan maupun kebijakan yang dibuat pemerintah, misalnya dulu masyarakat Samin tidak mau membayar pajak itu ya memang benar, karena apa karena dulu kita masih dijajah oleh Belanda, kalau kita membayar pajak artinya kita menyerahkan negara ini kepada Belanda..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa masyarakat Samin khususnya Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin ikut terlibat dalam proses pembuatan

kebijakan di tingkat Desa. Hal ini dikarenakan Harjo Kardi dianggap salah tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat, sehingga keberadaan Harjo Kardi di Dusun Jepang memiliki peranan penting untuk tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat di Dusun Jepang. Hal ini dibuktikan dengan usulan yang disampaikan oleh Harjo Kardi yaitu untuk pembuatan dam bagi masyarakat Dusun Jepang. Usulan tersebut bertujuan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Jepang, sehingga usulan tersebut dapat diterima oleh perangkat desa setempat untuk proses pembuatan dam di Dusun Jepang.

Namun untuk mengusulkan sesuatu ditingkat daerah Kabupaten tidak pernah, karena masyarakat Samin menganggap bahwa segala kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah sangat dipatuhi, termasuk kebijakan yang dibuat pemerintah tingkat daerah Kabupaten. Masyarakat Samin menganggap jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten sudah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat seluruhnya, sehingga masyarakat Samin tidak pernah untuk mengusulkan sesuatu di tingkat daerah Kabupaten.

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan organisasi yaitu terlibat dalam keanggotaan perangkat desa di Desa Margomulyo, karena terdapat salah satu masyarakat Samin yang tergabung dalam keanggotaan perangkat Desa di Desa Margomulyo, yaitu bapak Iswanto. Beliau dalam keanggotaan perangkat desa di Desa Margomulyo menjabat sebagai sekretaris desa. Bapak Iswanto adalah salah satu masyarakat Samin yang tetap memegang teguh ajaran dari Samin Surosentiko. Ketika beliau menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Margomulyo beliau sangat menerapkan ajaran dari Samin Surosentiko, salah satunya adalah harus mengutamakan sikap kejujuran dalam bertindak.

“berhubung saya ini sebagai masyarakat Samin dan sekarang saya sekretaris desa disini, kenapa saya menyebutkan sebagai masyarakat Samin karena memang saya asli dari Dusun Jepang dan orang tua saya juga sebagai masyarakat Samin, sejak kecil saya juga diajarkan untuk tetap memegang teguh prinsip masyarakat Samin, sampai sekarang ajaran dan prinsip masyarakat Samin itu ya saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja saya juga menerapkan ajaran itu, seperti tadi yang saya katakan harus jujur tidak boleh *srei* (bertengkar), harus hidup rukun, gotong royong seperti itu. Sampai sekarang saya tetap memegang teguh prinsip itu, kenapa saya tetap memegang teguh karena memang itu sikap yang benar yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan” (wawancara: Senin, 3 Juli 2017)

Iswanto selaku sekretaris desa di Desa Margomulyo menambahkan jika dirinya menjabat sebagai sekretaris

desa sejak tahun 2009, sehingga terhitung delapan tahun dari sekarang. Beliau juga menjelaskan jika awal pertama beliau menjabat sebagai sekretaris desa berusia 34 tahun.

“sejak tahun 2009 mbak saya sudah jadi sekretaris desa disini, waktu awal saya jadi sekretaris desa usia saya masih 34 tahun, sekarang ini usia saya sudah 42 tahun, jadi sudah 8 tahun saya menjabat sebagai sekretaris desa disini” (wawancara: Senin, 3 Juli 2017)

Iswanto juga menjelaskan jika menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Margomulyo memiliki beberapa peran yaitu untuk membantu kepala desa, serta untuk pengendalian urusan pengelolaan keuangan desa, memberikan pelayanan administrasi seperti urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.

“untuk peran ya banyak mbak, tapi peran yang paling utama ya membantu kepala desa, tetapi biasanya saya ya berperan untuk pengendalian urusan pengelolaan keuangan desa, memberikan pelayanan administrasi seperti urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan. Laporan itu ya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Selama ini saya melayani masyarakat dengan sepenuh hati karena memang ini amanah untuk saya, saya dipercaya untuk dapat menjalankan peran sekretaris desa disini. Ini merupakan kebanggaan tersendiri untuk saya mbak, karena tidak semua masyarakat bisa menjadi sekretaris desa di desa Margomulyo ini” (wawancara: Senin, 3 Juli 2017)

Dalam kegiatan organisasi untuk bergabung dalam keanggotaan partai politik pada masyarakat Samin tidak ada, karena masyarakat Samin menganggap jika politik itu kejam, serta banyak saudara yang menjadi musuh akibat bergabung dalam partai politik. Hal ini diungkapkan oleh Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin, beliau mengatakan jika tidak suka dengan politik karena politik dianggap dapat membuat masyarakat hidupnya tidak rukun.

“mboten leh, politik niku kejam, wong politik niku golek musuh, nek teng masyarakat mriki sing penting urip rukun, wong nek gabung teng politik niku uripe mboten rukun, kulo nggeh mboten seneng kok kaleh politik-politik ngoten niku, kulo nggeh mboten angsal nek anak putu kulo gabung teng partai politik”

“tidaklah, politik itu kejam, orang politik itu mencari musuh, kalau di masyarakat sini (masyarakat Samin) yang terpenting hidup rukun, orang kalau gabung dalam partai politik itu hidupnya tidak rukun, saya ya tidak suka dengan politik-politik seperti itu, saya ya tidak memperbolehkan kalau anak cucu saya bergabung dalam partai politik” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Selain itu untuk masyarakat Samin yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dalam partai politik juga tidak ada, karena masyarakat Samin menganggap

jika politik itu kejam. Selain itu mayoritas masyarakat yang ada di Dusun Jepang adalah seorang petani, sehingga tidak mungkin untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam partai politik. Hal ini diungkapkan oleh Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin. Beliau juga mengatakan jika untuk masyarakat Dusun Jepang tidak ada yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Kalau untuk Dusun Kalimajo ada yang dua orang pernah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam partai politik.

“mboten leh, nek masyarakat mriki niku mboten enten sing nyalonaken dados anggota legislatif teng partai politik, wau kulo lak mpun ngomong nek politik niku kejam dadi nggeh mboten enten, nek masyarakat mriki niku mboten seneng kangge politik-politik ngoten niku, wong bendino e nggeh teng sawah mawon. Nek masyarakat Dusun Kalimajo wonten kalih (2) tiyang sing nate nyalonaken kangge dados anggota legislatif teng partai politik, nek teng mriki mboten”

“tidak lah, kalau masyarakat sini (masyarakat Samin) itu tidak ada yang mencalonkan jadi anggota legislatif dalam partai politik, tadi saya kan sudah ngomong kalau politik itu kejam jadi ya tidak ada, kalau masyarakat sini itu tidak suka untuk politik-politik seperti itu, orang tiap harinya ya di sawah saja. Kalau masyarakat Dusun Kalimajo ada dua orang yang pernah mencalonkan diri untuk jadi anggota legislatif dalam partai politik, kalau disini tidak ada” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa untuk partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan organisasi hanya tergabung dalam keanggotaan perangkat desa saja, karena dalam masyarakat Samin terdapat satu orang yang menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Margomulyo. Sekretaris desa tersebut adalah bapak Iswanto. Namun untuk tergabung dalam keanggotaan partai politik maupun untuk mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif tidak ada, karena masyarakat Samin menganggap jika terjun dalam dunia politik sangat bertentangan dengan ajaran maupun prinsip hidup masyarakat Samin. Dengan demikian tidak ada masyarakat Samin yang tergabung dalam keanggotaan partai politik maupun untuk pencalonan menjadi anggota legislatif.

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam *contacting* yaitu mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah seperti Bupati maupun Kepala Desa. Hal ini diungkapkan oleh Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin. Beliau mengatakan jika untuk menjalin hubungan dengan Bupati Bojonegoro adalah hubungan baik, karena Bupati sudah terbiasa datang kerumah Harjo Kardi. Kedatangan Bupati dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat Samin,

salah satunya adalah dengan Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin di Dusun Jepang.

“nek hubungan kalih bupati nggeh hubungan sae, wong kulo niki dianggap tiyang sepuh, bupati Yoto niku mpun biasa tilik teng mriki, kadang setahun pisan, kadang enem sasi, pitung sasi, mboten mesti. Lha niku foto kulo kalih bupati, nggeh enten bupati suyono, bupati Santoso, enten bupati Yoto, nanging nggeh bupati Yoto niku sing nyeruk mriki. Mriki niku nggeh silaturahmi mboten kok diparingi napa-napa”

“kalau hubungan dengan bupati ya hubungan baik, orang saya ini dianggap sebagai orang tua, Bupati Yoto ya sudah biasa menjenguk datang kesini, terkadang setahun sekali, terkadang enam bulan, tujuh bulan, tidak pasti. Lha itu foto saya dengan bupati, ya ada Suyono, Bupati Santoso, ada bupati Yoto, tetapi ya Bupati Yoto itu yang sering datang kesini. Kesini itu silaturahmi tidak kok diberikan apa-apa” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Harjo Kardi juga menjelaskan bahwa kedatangan Bupati kerumahnya adalah untuk membahas mengenai kegiatan-kegiatan budaya masyarakat Samin. Selain itu pernah juga membahas mengenai pembangunan.

“kalih bupati Yoto nggeh kadang ngrembug kagiyatan budaya masyarakat Samin, nggeh nate nalika Bupati Yoto mriki ngrembug bangunan-bangunan ngoten niku”

“dengan bupati Yoto ya terkadang membahas kegiatan budaya masyarakat Samin, iya pernah ketika bupati Yoto datang kesini membahas bangunan-bangunan seperti itu” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Harjo Kardi juga menambahkan bahwa pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan untuk jalan masuk Dusun Jepang. Beliau mengatakan untuk pembangunan jalan tersebut dibantu oleh Bupati Yoto. Beliau juga menambahkan jika dulunya jalan tersebut tidak dapat dilewati jika musim hujan. Namun sudah sekitar dua tahun yang lalu jalan tersebut dipaving, sehingga jalan tersebut sudah baik. Hal ini berkat bantuan dari Bupati Yoto.

“...mbangun dalan, dalan sing saking ratan gedhe niku, sing arah teng Dusun Jepang. Dalan niku dek riyen koyok dalanan sapi, nek udan nggeh mboten saged di lewati, mpun enten rong (2) tahun dalan niku mpun sae, sampean nggeh ngertos niku wau dalane mpun di paving, niku nggeh bupati Yoto sing mbantu dhamel dalan niku...”

“...membangun jalan, jalan yang dari jalan raya itu, yang arah ke Dusun Jepang. Jalan itu dulunya seperti jalanan sapi, kalau hujan ya tidak bisa dilewati, sudah ada dua tahun jalan itu sudah bagus, kamu ya tahu itu tadi jalannya sudah di paving, itu ya Bupati Yoto yang membantu

membuat jalan itu...” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Iswanto membenarkan jika sekitar dua tahun yang lalu kedatangan Bupati Yoto pernah membahas mengenai pembangunan jalan untuk Dusun Jepang. Beliau menjelaskan jika pembangunan jalan tersebut dibantu oleh Bupati Yoto, karena menurutnya Bupati Yoto merasa prihatin dengan keadaan jalan masuk Dusun Jepang. sehingga Bupati Yoto memberikan bantuan untuk pembangunan jalan Dusun Jepang.

“...pernah sekitar dua tahun yang lalu, masyarakat sini mendapat bantuan untuk proses pembangunan jalan arah Dusun Jepang itu, ketika itu bupati berkunjung ke rumah mbah Harjo dengan keadaan jalan yang memprihatinkan sehingga bupati memberikan bantuan untuk pembangunan jalan Dusun Jepang. Sekarang ini jalannya sudah dipaving...” (wawancara: Senin, 3 Juli 2017)

Selain membahas mengenai pembangunan jalan untuk Dusun Jepang juga membahas mengenai kegiatan budaya masyarakat Samin. Menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin mengatakan jika untuk membahas mengenai kegiatan budaya masyarakat Samin ini dilakukan dengan berkumpul bersama dengan masyarakat Samin lainnya. Salah satu contoh kedatangan Bupati Yoto untuk membahas mengenai kegiatan budaya masyarakat Samin itu dilakukan ketika bulan oktober tahun 2016 lalu.

“nek masalah kebudayaan niku nggeh ngrembug kebudayaan masyarakat Samin niki, teruse bupati Yoto niku masyarakat Samin kudu tetep lesatarino kebudayaan niki, napa malih sakniki jarang sing dhamel prinsip hidup kaya masyarakat Samin, prinsip e nggeh urip rukun, gotong royong, mboten bedano liyane, tetep jujur. bupati Yoto niku mpun biasa teng mriki, pas sisi oktober tahun wingi bupati Yoto nggeh mriki kalih Polres Bojonegoro, pas niku nggeh ngempal kalih masyarakat mriki ngrembug kebudayaan masyarakat Samin mriki”

“kalau masalah kebudayaan itu ya membahas kebudayaan masyarakat Samin ini, katanya bupati Yoto itu masyarakat Samin harus tetap melestarikan kebudayaan ini, apalagi sekarang jarang yang menggunakan prinsip hidup seperti masyarakat Samin, prinsipnya ya hidup rukun, gotong royong, tidak membedakan lainnya, tetap jujur. bupati Yoto itu sudah biasa datang kesini, waktu bulan oktober tahun kemarin bupati Yoto ya kesini dengan Polres Bojonegoro, waktu itu ya membahas kebudayaan masyarakat Samin ini.” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa hubungan antara masyarakat Samin dengan Bupati Bojonegoro memiliki hubungan baik, serta menjalin hubungan silaturahmi. Hal ini dibuktikan dengan

seringnya kunjungan yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro kepada masyarakat Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo. Selain menjalin hubungan baik dengan Bupati Bojonegoro, masyarakat Samin juga menjalin hubungan baik dengan kepala desa di Desa Margomulyo. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin dalam rapat desa. Hal ini diungkapkan oleh Bambang Sutrisno bahwa Harjo Kardi memiliki hubungan baik dengan kepala desa, karena menurutnya setiap ada rapat Harjo Kardi selalu diundang untuk menghadiri rapat tersebut.

“dengan kepala desa hubungannya juga baik, kalau ada rencana pembangunan maupun rencana kegiatan budaya kepala desa juga mengundang mbah kong untuk ikut terlibat dalam proses rapat desa” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Hal ini juga diungkapkan oleh Harjo Kardi, beliau mengatakan jika memang benar beliau selalu menghadiri rapat desa, Harjo Kardi di Dusun Jepang dianggap sebagai sesepuh masyarakat Samin, sehingga beliau juga termasuk dalam salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Desa Margomulyo.

“nek rapat tingkat Desa nggeh ngrawuhi leh, wong kulo niki dianggep tiyang sepuh, kulo niki nggeh kalebet teng tokoh masyarakat, nggeh mesti ngrawuhi, wong biasane nek rapat niku sing diklumpukno nggeh tokoh masyarakat kaleh perangkat Desa”

“kalau rapat tingkat Desa ya menghadiri lah, orang saya ini dianggap orang tua, saya ini ya termasuk dalam tokoh masyarakat, ya jelas menghadiri, orang biasanya kalau rapat itu yang dikumpulkan ya tokoh masyarakat dengan perangkat Desa” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Harjo Kardi juga menambahkan jika dalam rapat desa tersebut memiliki peran untuk memberi solusi jika mengalami masalah dalam desa, seperti masalah dalam proses pembangunan desa, serta untuk memberikan persetujuan atas hasil keputusan dalam rapat desa. Hal ini dilakukan oleh Harjo Kardi karena beliau dianggap sebagai sesepuh masyarakat yang sangat disegani oleh masyarakat maupun perangkat desa di Desa Margomulyo. Harjo Kardi juga menambahkan jika menjadi sesepuh masyarakat itu tidak gampang.

“kulo nggeh dados tiyang sepuh, kulo nggeh dijaluki pendapat umpama bangun dalam, ragate kurang, terus pripun nek kurang, kulo sing dudohno nggeh kudu gotong royong ngoten niku leh. Dados tiyang sepuh niku mboten gampang. Terus umpamane wonten hasil rapat keputusane ngeten, kulo nggeh ngewenehi pendapat setuju napa mboten, nek setuju alasane napa, nek mboten setuju alasane napa ngoten niku”

“saya ya jadi orang tua, saya ya dimintai pendapat seumpama membangun jalan, dananya masih kurang, terus bagaimana kalau kurang, saya yang memberitahu ya harus gotong royong seperti itu lah. Jadi orang tua itu tidak mudah. Kemudian seumpamanya ada hasil rapat keputusannya begini, saya ya memberikan pendapat setuju apa tidak, kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju alasannya apa seperti itu” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Namun untuk menghadiri rapat tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten tidak pernah. Hal ini diungkapkan oleh Harjo Kardi Karena menurut Harjo Kardi bahwa untuk rapat tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten tidak ada urusannya dengan beliau.

“mboten ngrawuhi kulo, wong rapat tingkat kecamatan utawa tingkat kabupaten niku mpun mboten urusan kulo, rapat sing kulo ngrawuhi nggeh namung tingkat Desa niku”

“tidak menghadiri saya, orang rapat tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten itu sudah tidak urusan saya, rapat yang saya hadiri ya Cuma tingkat Desa itu” (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sidi selaku ketua RT 01 sekaligus masyarakat Samin, beliau mengungkapkan jika untuk rapat tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten tidak menghadiri, karena untuk rapat tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan masyarakat Samin.

“...nek rapat tingkat kabupaten utawa tingkat kecamatan nggeh mboten ngrawuhi to, niku nggeh mboten enten kaitane kalih masyarakat mriki...”

“...kalau untuk tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan ya tidak menghadirilah, itu ya tidak ada kaitannya dengan masyarakat sini...” (wawancara: Senin, 3 Juli 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa masyarakat Samin ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat Desa, karena Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin ikut menghadiri rapat-rapat desa yang membahas mengenai rencana pembangunan, rencana kegiatan budaya serta berkaitan dengan masalah pertanian. Dari yang dibahas ketika menghadiri rapat desa maka Harjo Kardi ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat Desa, karena yang dibahas dalam rapat desa termasuk dalam kebijakan desa, seperti program pembangunan, kegiatan budaya maupun terkait masalah pertanian.

Dalam rapat tersebut Harjo Kardi juga berperan untuk memberikan solusi ketika terdapat permasalahan dalam desa, serta memberikan persetujuan terkait hasil keputusan dalam rapat desa tersebut. Hal ini dilakukan Harjo Kardi karena agar hasil keputusan yang dibuat

dalam rapat desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun untuk pembuatan kebijakan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten masyarakat Samin tidak ikut terlibat, karena menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin jika pembuatan kebijakan dalam tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten tidak ada kaitannya dengan masyarakat Samin. Hal ini dikarenakan untuk kebijakan tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten berlaku untuk masyarakat seluruhnya, tetapi kalau untuk kebijakan Desa ada kaitannya dengan masyarakat Samin karena kebijakan tersebut berlaku bagi masyarakat di Desa Margomulyo termasuk masyarakat Samin yang ada di Dusun Jepang.

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam tindakan kekerasan tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan ketika calon yang didukung tidak jadi, Hal ini diungkapkan oleh Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin.

“nggeh mboten, lakon e kulo niki mboten kok nglakoni tumindak kekerasan, masyarakat mriki nggeh ngoten mboten nglakoni tumindak kekerasan, napa maleh namung masalah jagone mboten dados, niku nggeh nasibe jagone mboten dados, mboten kok masyarakat mriki rame nglakoni tumindak kekerasan”

“ya tidak, watak saya ini tidak kok melakukan tindakan kekerasan, masyarakat sini ya begitu tidak melakukan tindakan kekerasan, apalagi Cuma masalah calon yang di dukung tidak jadi, itu ya nasib calonnya tidak jadi, tidak kok masyarakat sini ramai melakukan tindakan kekerasan” (wawancara: Selasa, 20 Juli 2017)

Harjo Kardi juga menambahkan jika alasan bagi masyarakat Samin untuk tidak melakukan tindakan kekerasan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Samin Surosentiko selaku pemimpin masyarakat Samin ketika jaman penjajahan Belanda. Karena dulu masyarakat Samin melawan penjajah Belanda tidak boleh menggunakan kekerasan, apalagi hanya untuk masalah calon yang didukung tidak jadi.

“...kangge kulo niku mboten angsal nglakoni tumindak kekerasan ngoten niku, napa malih namung masalah jagone mboten dados, niku kliru, mbah buyut kulo nglawan penjajah Londo mboten nglakoni tumindak kekerasan kok napa malih namung masalah ngoten niku, nggeh mboten. Biyen niku mbah Surosentiko ngajarno nek anak putune mboten angsal nglakoni tumindak kekerasan utawa tumindak ala, wong biyen mbah Surosentiko ngajarne nglawan penjajah Londo mboten angsal dhamel kekerasan kok...”

“...buat saya itu tidak boleh melakukan tindakan kekerasan seperti itu, apalagi cuma masalah

calon yang didukung tidak jadi, itu salah, mbah buyut saya melawan penjajahan Belanda tidak melakukan tindakan kekerasan kok apalagi Cuma masalah seperti itu, ya tidak. Dulu itu mbah Surosentiko mengajarkan ke anak cucunya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau tindakan *ala* (buruk), wong biyen mbah Surosentiko mengajarkan melawan penjajah Belanda tidak boleh melakukan tindakan kekerasan kok..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Selain tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan ketika calon yang didukung tidak jadi, juga tidak ada masyarakat Samin yang melakukan demonstrasi yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya demo dengan merusak fasilitas umum. Karena masyarakat Samin menganggap bahwa semua saudara sehingga tidak boleh melakukan demonstrasi. Hal ini juga dikarenakan prinsip masyarakat Samin, yaitu diibaratkan seperti "*dom sumuruping banyu*" artinya bahwa semua dianggap saudara, pemimpin pemerintah juga dianggap saudara bagi masyarakat Samin, sehingga masyarakat Samin mematuhi segala peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

"...nggeh mboten, kulo niki prinsipe kados "*dom sumuruping banyu*" artine sedoyo masyarakat niku dulur kulo, pemimpin pemerintah sinten mawon niku nggeh dulur kulo, kulo nggeh manut kalih kebijakan napa mawon. kulo niki mboten seneng nglakoni tumindak ala utawa tumindak kekerasan ngoten niku, jajal dom nek dicemplungno banyu apa enek gelombange, mboten to niku nggeh lakone kulo, maksude niku sedoyo nggeh dulur mboten angsal ngangge kekerasan tetap jujur ngoten niku..."

"...iya tidak, saya ini prinsipnya seperti "*dom sumuruping banyu*" (jarum dimasukkan dalam air) artinya semua masyarakat itu saudara saya, pemimpin pemerintah siapa saja itu ya saudara saya, saya ya taat dengan kebijakan apa saja, saya ini tidak suka melakukan tindakan ala (buruk) atau tumindak kekerasan seperti itu, coba jarum kalau dimasukkan dalam air apa ada gelombangnya, tidak kan itu ya watak saya, maksudnya itu semua ya saudara tidak menggunakan kekerasan tetap jujur seperti itu..." (wawancara: Selasa, 20 Juni 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa dalam masyarakat Samin tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan, karena tindakan kekerasan dianggap tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat Samin.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini rumusan masalah akan dianalisis dengan menggunakan teori partisipasi politik oleh Huntington dan Nelson yang membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi lima bentuk, yaitu:

kegiatan pemilihan, *lobby*, kegiatan organisasi, *contacting* dan tindakan kekerasan.

Kegiatan Pemilihan

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan pemilihan yaitu hanya terlibat dalam penggunaan hak pilih pada pemilu. Dari data yang diperoleh bahwa alasan masyarakat Samin menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, karena masyarakat Samin menganggap bahwa sudah menjadi kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan sikap patuh dan taat terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga bagi masyarakat Samin dengan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu dapat ikut mensukseskan terselenggaranya kegiatan pemerintah.

Menurut Bambang Sutrisno selaku anak terakhir dari Harjo Kardi mengatakan bahwa dalam menggunakan hak pilih masyarakat Samin memilih atas kesadarannya masing-masing, tanpa adanya paksaan maupun adanya *money* politik, karena masyarakat Samin memilih yang menurutnya baik maka akan dipilih, sehingga proses penggunaan hak pilih berdasarkan hati nuraninya sendiri. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Samin agar tetap mewujudkan sikap jujur, seperti apa yang telah diajarkan oleh Samin Surosentiko selaku pemimpin masyarakat Samin ketika penjajahan Belanda.

Namun untuk partisipasi masyarakat Samin dalam kegiatan kampanye yaitu tidak ikut terlibat dalam kegiatan kampanye, karena masyarakat Samin menganggap jika kegiatan kampanye adalah kegiatan yang dapat menimbulkan perselisihan dengan yang lainnya, sehingga kegiatan kampanye dianggap sebagai kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat Samin. Karena masyarakat Samin menganggap bahwa semua adalah saudara, sehingga tidak boleh ada perselisihan, dengan yang lainnya harus hidup rukun dan gotong royong.

Selain itu masyarakat Samin juga menganggap jika kegiatan kampanye adalah kegiatan yang tidak ada manfaatnya, karena kegiatan kampanye dianggap kegiatan yang hanya menghabiskan uang. Sehingga masyarakat Samin lebih memilih dirumah dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye.

Dalam masyarakat Samin untuk menjadi tim sukses juga tidak ada, karena masyarakat Samin menganggap jika tim sukses adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan masa agar dapat menjadi pendukung yang memilih calonnya. Mengumpulkan masa ini dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan mempengaruhi orang lain agar memilih calonnya. Hal ini dianggap salah oleh masyarakat Samin, karena menurut masyarakat Samin memilih harus atas kesadarannya

masing-masing, tanpa adanya paksaan. Sehingga untuk menjadi tim sukses dalam masyarakat Samin tidak ada, karena hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsipnya yang harus mengutamakan sikap kejujuran.

Lobby

Partisipasi politik dalam bentuk *lobby* ini masyarakat Samin khususnya Harjo Kardi mengatakan jika pernah menghubungi kepala desa, dari data yang diperoleh bahwa tujuan Harjo Kardi untuk menghubungi pimpinan politik (kepala desa) adalah untuk mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran pada rumah warga Dusun Jepang, selain itu tujuan Harjo Kardi untuk menghubungi kepala desa adalah untuk meminta bantuan agar warga yang rumahnya kebakaran mendapatkan bantuan dari dana desa. Hal ini dilakukan Harjo Kardi agar dapat menolong sesama saudaranya, karena masyarakat Samin menganggap jika semua adalah saudara, jadi jika ada saudara yang membutuhkan bantuan harus ditolong.

Namun untuk menghubungi Bupati tidak pernah, karena dari data diperoleh bahwa tanpa dihubungi antara Bupati dan masyarakat Samin telah menjalin hubungan baik. Hal ini dibuktikan dengan seringnya kunjungan Bupati ke rumah Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin.

Selanjutnya untuk mengusulkan sesuatu kepada Bupati dan DPRD tentang suatu kebijakan di tingkat Kabupaten tidak, karena bagi masyarakat Samin segala kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan masyarakat Samin sangat memegang teguh ajaran yang disampaikan oleh Samin Surosentiko selaku pemimpin masyarakat Samin ketika jaman penjajahan Belanda. Beliau berpesan dengan menggunakan bahasa sanepan yaitu "*yen wis yen wis pitukule kanjeng Jawa, tinggi Jawa tunggu rakyat, manggon mburi manut ombake banyu*" artinya adalah jika negara sudah dipimpin oleh orang Jawa maka masyarakat Samin harus patuh dan taat dengan segala kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dari data diperoleh untuk mengusulkan sesuatu tentang kebijakan di tingkat desa pernah. Hal ini disampaikan oleh Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin, bahwa beliau pernah mengusulkan agar Dusun Jepang dibuatkan dam (bendungan) untuk membantu orang tani irigasi air. Hal ini dilakukan Harjo Kardi agar dapat meningkatkan hasil panen para petani karena jika hasil panen meningkat maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Jepang.

Kegiatan Organisasi

Dalam kegiatan organisasi ini masyarakat Samin hanya terlibat dalam keanggotaan perangkat desa di Desa

Margomulyo, karena terdapat salah satu masyarakat Samin yang menjabat sebagai Sekretaris desa di Desa Margomulyo yaitu Bapak Iswanto. Bapak Iswanto menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Margomulyo sejak tahun 2009. Beliau menjelaskan jika selama menjabat sebagai sekretaris desa tetap mengutamakan kejujuran. Hal ini sesuai dengan prinsip masyarakat Samin.

Dalam masyarakat Samin tidak yang bergabung dalam keanggotaan partai politik, karena masyarakat Samin menganggap jika bergabung dalam keanggotaan partai politik hidupnya tidak rukun, karena dalam partai politik terdapat golongan-golongan yang saling bermusuhan. Dengan demikian masyarakat Samin menganggap jika bergabung dalam keanggotaan partai politik dianggap salah, karena tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat Samin yang harus hidup rukun dengan yang lain, serta tidak boleh ada yang bermusuhan karena semua dianggap saudara.

Selain itu, tidak ada masyarakat Samin yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif, karena masyarakat Samin menganggap jika untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif berarti juga bergabung dalam partai politik, sehingga dalam partai politik terdapat golong-golongan yang bersaing dengan saling menjatuhkan dengan yang lain. Hal ini juga dilakukan dengan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Sehingga dalam masyarakat Samin tidak ada yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif, karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran maupun prinsip hidupnya yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat Samin.

Contacting

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam *contacting* yaitu memiliki hubungan baik dengan Bupati Bojonegoro. Hal ini dibuktikan dengan seringnya kunjungan yang dilakukan Bupati Bojonegoro di rumah Harjo Kardi. Menurut Harjo Kardi biasanya yang dibahas ketika adanya kunjungan Bupati Bojonegoro adalah mengenai kegiatan budaya masyarakat Samin. Seperti ketika bulan oktober tahun 2016. Selain itu juga pernah untuk membahas mengenai pembangunan jalan di Dusun Jepang.

Selain itu, hubungan antara Harjo Kardi dengan kepala desa di Desa Margomulyo juga memiliki hubungan baik. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin dalam rapat desa di Desa Margomulyo. Dalam rapat desa tersebut yang dibahas mengenai rencana pembangunan desa, rencana kegiatan budaya serta terkait masalah pertanian. Menurut Harjo Kardi dalam rapat tersebut beliau berperan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dalam desa,

misalnya seperti masalah untuk pembangunan desa. Serta untuk memberikan persetujuan terkait hasil keputusan dalam rapat desa.

Namun untuk ikut menghadiri rapat dalam tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten tidak, karena menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin mengatakan jika untuk rapat tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten tidak ada kaitannya dengan masyarakat Samin, karena untuk kebijakan dalam tingkat kabupaten maupun kecamatan bersifat menyeluruh, artinya berlaku bagi masyarakat luas.

Tindakan Kekerasan

Dari data diperoleh bahwa tidak ada masyarakat Samin yang melakukan tindakan kekerasan ketika calon yang didukung tidak jadi, karena menurut Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin menganggap jika untuk melakukan tindakan kekerasan untuk calon yang didukung tidak jadi adalah salah. Apalagi dulu Samin Surosentiko selaku pemimpin masyarakat Samin ketika jaman penjajahan Belanda dulu juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan ketika masyarakat Samin dulu memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda tidak menggunakan kekerasan dan tetap bersikap jujur. Padahal Belanda adalah musuh bagi masyarakat Samin waktu itu, apalagi hanya untuk masalah calon yang didukung tidak jadi. Dengan demikian dalam masyarakat Samin tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan ketika calon yang didukung tidak jadi, karena hal ini dianggap telah sesuai dengan ajaran masyarakat Samin yang tidak boleh menggunakan kekerasan.

Selain itu, untuk melakukan demonstrasi yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya demo dengan merusak fasilitas umum juga tidak ada, karena dalam masyarakat Samin tidak ada yang melakukan demonstrasi. Harjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin menjelaskan untuk masyarakat Samin seluruhnya sangat mematuhi segala peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena masyarakat Samin menganggap jika pemimpin pemerintahan adalah saudaranya, sehingga dengan sesama saudara harus saling menghargai tidak boleh melakukan tindakan kekerasan seperti melakukan demo dengan merusak fasilitas umum. Menurut masyarakat Samin hal ini diibaratkan seperti "*dom sumuruping banyu*", artinya adalah bahwa semua dianggap saudara, harus saling menghargai, karena jika *dom* (jarum) dimasukkan dalam air maka tidak ada gelombangnya, sehingga bagi masyarakat Samin dengan sesama saudara tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, harus saling menghargai.

PENUTUP

Simpulan

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan pemilihan hanya terlibat dalam penggunaan hak pilih ketika pemilu, karena masyarakat Samin menganggap jika dengan ikut terlibat dalam penggunaan hak pilih ketika pemilu adalah menjadi kewajiban setiap warga negara yang baik. Hal ini dilakukan masyarakat Samin dengan tujuan agar mampu mewujudkan sikap patuh dan taat pada pemerintah.

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam *lobby* yaitu pernah menghubungi kepala desa. Hal ini dilakukan Harjo Kardi ketika terdapat salah satu warga Dusun Jepang yang rumahnya kebakaran. Namun untuk menghubungi bupati tidak pernah. Selain itu masyarakat Samin juga pernah mengusulkan sesuatu tentang kebijakan ditingkat desa, yaitu berkaitan dengan usulan mengenai kebijakan program pembangunan desa. Namun untuk mengusulkan sesuatu tentang kebijakan ditingkat Kabupaten tidak pernah.

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan organisasi yaitu hanya tergabung dalam keanggotaan perangkat desa di Desa Margomulyo, karena terdapat salah satu anggota masyarakat Samin yaitu Bapak Iswanto yang menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Margomulyo. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Margomulyo sejak tahun 2009.

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam *contacting* bahwa masyarakat Samin memiliki hubungan baik dengan Bupati Bojonegoro. Selain itu masyarakat Samin juga menjalin hubungan baik dengan kepala desa di Desa Margomulyo, karena setiap adanya rapat desa Harjo Kardi menghadiri rapat tersebut. Sehingga dapat dikatakan masyarakat Samin dapat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa.

Partisipasi politik masyarakat Samin dalam tindakan kekerasan tidak ada, karena untuk melakukan tindakan kekerasan ketika calon yang didukung tidak jadi maupun untuk demonstrasi yang tidak sesuai prosedur tidak dilakukan oleh masyarakat Samin.

Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Samin tidak suka terhadap adanya politik praktis, karena dalam masyarakat Samin tidak ada yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, tidak ada yang pernah menjadi tim sukses, tidak ada yang bergabung dalam keanggotaan partai politik, serta tidak ada yang pernah mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dalam partai politik.

Saran

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu adanya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro terkait partisipasi politik masyarakat Samin

yang berada di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat Samin dalam pemilu maupun dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat Kabupaten maupun tingkat desa.

Kepada Masyarakat Samin di Dusun Jepang, harus tetap dipertahankan dan dilestarikan ajaran yang telah diajarkan oleh pemimpinnya dahulu, agar generasi penerus masyarakat Samin dapat meneruskan ajarannya kepada generasi berikutnya. Serta masyarakat Samin diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya secara aktif dalam kegiatan politik, khususnya terkait dengan politik praktis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR PUSTAKA

- Berita "Antarajatim.Com". Editor: Slamet Hadi Purnomo. *Komunitas Samin di Bojonegoro Gunakan Hak Pilihnya*. (<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/130561/komunitas-samin-di-bojonegoro-gunakan-hak-pilihnya>, Diakses tanggal 9 Maret 2017).
- Berita "Gatra.com". *Masyarakat Samin Tidak Akan "Nyamin" di Pilgub Jatim*. (<http://arsip.gatra.com/2008-06-10/artikel.php?id=115355> diakses tgl 25 mei 2017).
- Berita "kabarbisnis". *Warga Samin Bojonegoro belum paham pemilu* (<http://www.kabarbisnis.com/read/281667/warga-samin-bojonegoro-belum-paham-pemilu> diakses 25 mei 2017).
- Berita "Kompas.com" *.Orang Samin Memandang Pemilu*. (<http://regional.kompas.com/read/2009/04/10/11091966/Orang.Samin.Memandang.Pemilu> di akses 25 mei 2017).
- Berita "Krijogja.Com" Editor: Ivan Aditya. *Keturunan Samin Bakal Golput*. (<http://pemilu.okezone.com/read/2014/03/14/568/955145/kaum-samin-di-bojonegoro-bakal-golput>, diakses tanggal 9 Maret 2017)
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : UNY Press.
- Moelong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitati*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidika : Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.